

# MEMAHAMI VARIABEL PENENTU KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh:

Drs. H. Deddy As Shidiq, S.H., M.Si.  
Dosen FIA Universitas Subang

## Abstrak

*Sebagai variabel, implementasi kebijakan sama dengan fungsi dari intention, output, dan outcome, serta dapat dianggap sebagai persamaan fungsi dari policy atau dapat berposisi sebagai variabel terikat maupun bebas. Dengan mengetahui model implementasi kebijakan, akan mudah memahami variabel implementasi, sehingga dapat pula memahami variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan mempunyai peran yang penting dari pembuatan sebuah kebijakan.*

Kata kunci: variabel implementasi kebijakan, model implementasi kebijakan, variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan

## Pendahuluan

Seringkali kita menghadapi masalah dalam mempelajari kegagalan maupun keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, baik melalui perspektif peneliti maupun bagi praktisi kebijakan. Perhatian kita selalu terfokus pada aspek perumusan maupun analisis kebijakan sebagai faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan. Padahal, tahap implementasi kebijakan merupakan posisi yang sangat strategis dan menentukan. Selain itu, dalam studi implementasi kebijakan, sering kali kita tidak bertitik tolak pada posisi variabel apa yang memulainya, apakah sebagai variabel bebas atau variabel terikat. Dengan demikian, pemahaman atas variabel implementasi kebijakan merupakan langkah awal untuk mengetahui faktor penyebab kegagalan maupun keberhasilan suatu kebijakan.

Sebelum memahami variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, seyogianya kita mendalami terlebih dahulu model implementasi kebijakan yang digunakan. Dari model ini maka dapat diketahui teori apa yang saja yang dapat digunakan untuk menganalisis variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

## Implementasi Kebijakan

Istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah dan perilaku negara pada umumnya. Kebijakan dapat pula bermakna politis atau rangkaian instruksi dari pembuat kebijakan yang ditujukan kepada pelaksana. Sejumlah ahli mengartikan kebijakan sebagai suatu rangkaian prinsip dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, pemerintah, atau aktor terhadap suatu masalah dan mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dye berpendapat bahwa kebijakan negara adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan Udoji (dalam Wahab, 1997:5) mengidentifikasi kebijakan negara sebagai tindakan bersanksi dengan tujuan tertentu yang diarahkan pada masalah atau kelompok masalah yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Jadi yang membedakan antara kebijakan pemerintah dan bukan pemerintah adalah: *pertama*, bahwa kebijakan pemerintah berkaitan dengan adanya sanksi. *Kedua*, kebijakan pemerintah dibuat dalam rangka hubungan pemerintah dengan (sebagian besar) masyarakat. *Ketiga*, kebijakan merupakan pilihan pemerintah, baik melakukan maupun tidak melakukan sesuatu yang menyangkut masyarakat banyak (publik).

Apabila kebijakan dipandang merupakan sebuah sistem, maka kebijakan memiliki tiga buah komponen yang berinteraksi secara timbal balik, dimana satu sama lainnya berhubungan dan berinteraksi. Ketiga komponen tersebut adalah:

1. Pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), yaitu pemerintah atau non-pemerintah maupun privat yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.
2. Lingkungan kebijakan (*policy environment*), yaitu bidang-bidang kehidupan masyarakat yang dapat atau perlu dipengaruhi oleh kebijakan. Contohnya: penerapan nilai-nilai demokrasi, pengangguran, kriminalitas, efisiensi dan produktivitas kerja, pencemaran lingkungan, urbanisasi, dan sebagainya
3. Kebijakan publik (*public policy*), mencakup persepsi, agregasi, organisasi, representasi, penyusunan agenda, formulasi, legitimasi, pelaksanaan atau implementasi, evaluasi, dan penyesuaian atau terminasi.

Pengertian kebijakan dalam arti luas dikemukakan oleh Anderson (dalam Wahab, 1997:5) yang merumuskannya sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sebelum mengemukakan pengertian implementasi kebijakan, terlebih dahulu perlu dikemukakan secara esensial tiga tahapan dalam proses pembentukan suatu kebijakan publik. Menurut Nakamura dan Smallwood (1980:31) ketiga tahapan tersebut adalah perumusan kebijakan (*policy formulation*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy evaluation*). Dari ketiga tahapan tersebut, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dan krusial bagi pencapaian tujuan kebijakan.

Secara konseptual, Pressman dan Wildavsky (1993:485) berpendapat bahwa *implementation may be viewed as a process of interaction between the setting of goals and actions to achieving them*. Pemikiran ini mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses interaksi antara penyusunan (penataan) berbagai tujuan dengan tindakan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Sedangkan menurut van Meter dan van Horn (dalam Wahab : 1997 : 65), proses implementasi adalah *...those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan, baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan.

Para ahli kebijakan menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda-beda. Namun, pada prinsipnya setiap formulasi kebijakan senantiasa ditindak lanjuti dengan langkah implementasi. Pengertian implementasi secara sederhana dikemukakan oleh Grindle (1980:7) sebagai *suatu proses menyeluruh dari tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkatan program yang khusus*. Grindle (1980:59) juga mengemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan penjabaran keputusan politik dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan manfaat yang diperoleh dari suatu kebijakan.

### **Implementasi Kebijakan Sebagai Variabel**

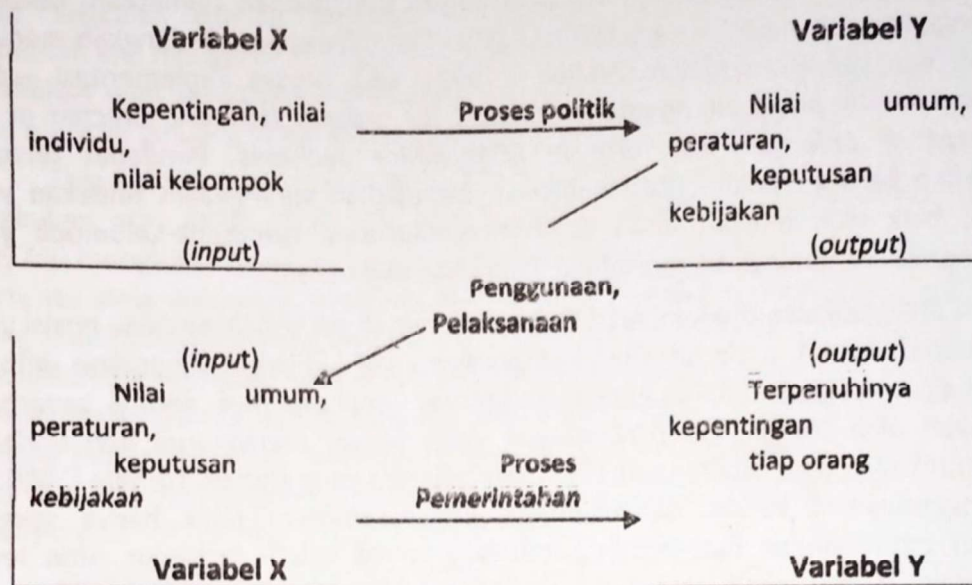
Implementasi kebijakan sebagai konsep menurut Lane (1995:99) terdiri atas dua bagian. *Pertama*, implementasi sama dengan fungsi dari *intention, output dan income*. Dengan kata lain, implementasi kebijakan merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil sebagai suatu akibat. *Kedua*, implementasi dapat dianggap sebagai persamaan dari fungsi *policy, formator, implementor, initiator, dan time*. Berdasarkan dua persamaan fungsi implementasi ini, penekanan utamanya tetap pada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang akan dicapai untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Wahab (2001:13) mengemukakan bahwa kebijakan publik dapat dilihat sebagai variabel terikat dan variabel bebas, sebagai berikut :

“Jika kebijakan dipandang sebagai variabel tergantung, maka perhatian akan diarahkan pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang diduga mempengaruhi isi kebijakan negara....Apabila kebijakan negara dipandang sebagai variabel bebas, perhatian akan diarahkan pada dampak kebijakan tersebut terhadap sistem politik dan lingkungannya”.

Sementara itu, Ndraha (1997:143) mengombinasikan pemahaman kebijakan sebagai variabel bebas dan variabel tergantung sebagaimana digambarkan dalam model berikut:

Gambar 1 : Proses Politik vs Proses Pemerintahan



Sumber : Ndraha, 1997 : 143

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa implementasi kebijakan mengandung unsur-unsur:

1. Proses, yaitu rangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Tujuan, yaitu entitas yang akan dicapai melalui aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan.
3. Hasil atau dampak, yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Udoji (1981:32) berpendapat bahwa *"The execution of policies is an important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented"* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal yang penting, bahkan lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan dipandang sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Dalam konteks implementasi kebijakan ini terdapat sejumlah fenomena. Gejala *implementation gap*, misalnya, menurut Dunshire (1978) merupakan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu terbuka peluang kemungkinan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Gejala lainnya adalah *implementation capacity*, yang menurut Williams (1971, 1975) merupakan kemampuan organisasi/aktor dalam melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai.

Dalam implementasi program, khususnya yang melibatkan banyak organisasi/instansi pemerintah atau berbagai tindakan struktur, organisasi pemerintah dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yakni:

1. Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (*the center/pusat*).
2. Pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*)
3. Aktor perorangan di luar badan pemerintah, kepada siapa program itu ditujukan (obyek), yakni kelompok sasaran (*target group*).

### Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi yang paling populer dalam studi kebijakan adalah model *top down* dan *bottom up* yang merupakan hasil studi dari Mazmanian dan Sabatier. Menurut Sabatier (1986), kelebihan dari pendekatan *top down* adalah:

1. Pemahaman akan mudah diperoleh, baik mengenai berapa besar pengaruh dari cara kerja instrumen-instrumen legal seperti undang-undang dan peraturan pemerintah serta peraturan legal lainnya. Pada pendekatan ini, fokus perhatian ditujukan pada pendukung program yang dianggap sebagai faktor kunci dalam implementasi kebijakan.
2. Dapat memberi bantuan dalam melakukan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditentukan secara legal.
3. Dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan program yang dilaksanakan sehingga aktor yang terlibat dapat menciptakan strategi baru pada saat implementasi kebijakan masih berlangsung.

Sementara itu, beberapa kelemahan yang juga dimiliki oleh model *top down* ini menurut Sabatier (1986) adalah:

1. Metode ini menggiring para pengikutnya untuk mengasumsikan para *decision maker* sebagai aktor utama, sedangkan yang lainnya dianggap sebagai penghalang dalam implementasi kebijakan.
2. Penerapan pada lembaga pemerintah yang terlalu banyak akan mengalami kesulitan, begitu juga terhadap aktor-aktor lain yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan.
3. Strategi yang digunakan kelompok-kelompok bawah dan kelompok sasaran kurang menjadi perhatian.

Selain pendekatan *top down*, dikembangkan pula pendekatan atau model *bottom up*. Menurut Sabatier (1986) menggunakan analisis dengan cara mengidentifikasi jaringan aktor-aktor yang terlibat dalam satu atau lebih dari wilayah lokal dan mempertanyakan tujuan-tujuan dan hubungan di antara mereka yang terlibat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan program pemerintah. Pendekatan ini juga memfokuskan persoalan pada interaksi yang terjadi di antara berbagai aktor dalam suatu jaringan kebijakan.

Selanjutnya, Sabatier (1986) menjelaskan kelebihan dari pendekatan *bottom up* ini sebagai berikut:

1. Akan memperoleh pemahaman yang jelas tentang proses interaksi di antara aktor yang terlibat dalam tahap implementasi kebijakan.
2. Mempermudah dan merelativisir pentingnya program pemerintah dalam memecahkan masalah.
3. Dapat memperlihatkan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari program-program pemerintah.

Sementara itu, beberapa kelemahan yang juga dimiliki oleh model *bottom up* ini menurut Sabatier (1986) adalah:

1. Fokus perhatiannya pada tujuan-tujuan para aktor, sehingga mudah terjebak untuk mengabaikan pengaruh pusat yang mempengaruhi struktur kelembagaan dimana aktor tersebut beroperasi.
2. Melihat sumber daya para aktor sebagai suatu keputusan tanpa adanya upaya penyelidikan tersebut beroperasi.
3. Keterlibatan para aktor sebagai suatu keputusan kebijakan tanpa disertai penjelasan mengenai upaya-upaya sebelumnya yang dilakukan.
4. Tidak mampu menciptakan bangunan teori secara eksplisit dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepentingan subyektif para aktor.

#### **Variabel Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan**

Berdasarkan gambaran beberapa aspek kelebihan dan kelemahan dari model pendekatan *top down* dan *bottom up* ini, maka lebih lanjut menurut Sabatier (1986) memberikan pertimbangan bahwa pendekatan *bottom up* tidak perlu digunakan untuk mempertimbangkan keterlibatan banyak aktor dalam implementasi kebijakan. Hal ini berlaku juga dalam analisis untuk mengetahui efektivitas program. Selain itu, pendekatan *bottom up* juga diperuntukkan bagi pemerintahan yang memiliki dana dan waktu yang cukup banyak. Sementara model pendekatan *top down* lebih cepat digunakan terhadap kasus dimana pemerintah bertindak sebagai agen yang dominan dengan analisis kepentingan untuk mengetahui efektivitas program, di samping dapat dipergunakan oleh pemerintah yang memiliki dana dan waktu yang terbatas.

Menurut Sabatier, terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Karakteristik masalah
  - 1). Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
  - 2). Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
  - 3). Proporsi kelompok sasaran terhadap populasi.
  - 4). Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
2. Karakteristik kebijakan
  - 1). Kejelasan isi kebijakan.
  - 2). Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
  - 3). Besarnya alokasi sumber daya terhadap kebijakan tersebut.

- 4). Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai instansi pelaksana.
  - 5). Konsistensi aturan pada pelaksana.
  - 6). Komitmen aparat terhadap tujuan.
  - 7). Akses formal pihak luar.
3. Lingkungan kebijakan
- 1). Kondisi ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
  - 2). Dukungan publik.
  - 3). Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*).
  - 4). Tingkat komitmen dan keterampilan aparat serta implementor.

Dalam studi implementasi kebijakan, terdapat pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan. Pendekatan ini dikemukakan oleh Edwards III (1980 : 9), yang terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok: (1). *What are preconditions for successful policy implementation?*; dan (2). *What are the primary obstacles to successful policy implementation?* Dari kedua pertanyaan ini dapat dinyatakan bahwa faktor-faktor yang dimaksud oleh Edwards III akan menjadi pendukung utama implementasi jika dikelola dengan baik dan akan menjadi penghambat utama jika tidak dikelola dengan baik. Implementasi kebijakan diharapkan berlangsung secara efektif menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pernyataan di atas, Edwards III (1980:9-10) mengemukakan 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu:

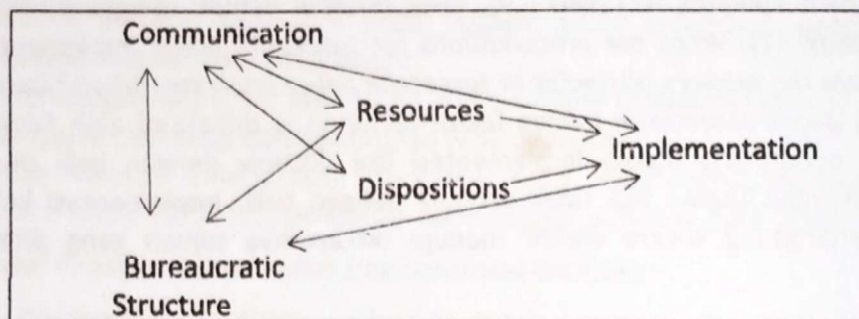
1. Komunikasi. Aspek komunikasi mempunyai peran yang sangat penting sebagai acuan pelaksanaan kebijakan dalam mengetahui secara persis apa yang akan dikerjakan. Hal ini berarti komunikasi juga dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana kebijakan, sehingga komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, cepat, dan konsisten.
2. Sumber daya. Keberadaan sumber daya dalam konteks ini bukan hanya menyangkut sumber daya manusia semata, melainkan sumber daya lainnya yang mendukung kebijakan tersebut, termasuk faktor dana.
3. Disposisi. Dipandang sebagai kegunaan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan, jika penerapan kebijakan dilakukan secara efektif. Pelaksana bukan hanya harus tahu apa yang harus mereka kerjakan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan.
4. Struktur birokrasi. Aspek struktur birokrasi mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan, dalam arti bahwa penerapan kebijakan tidak akan mengadopsi karakteristik birokrasi yang umum, yaitu sikap dan prosedur yang rutin, serta transformasi dalam pertanggung jawaban di antara unit-unit organisasi.

Edwards III menjelaskan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berpengaruh langsung terhadap implementasi kebijakan, serta juga mempengaruhi dan berdampak pada masing-masing faktor dimaksud. Dengan kata

lain, komunikasi mempengaruhi sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang mana pada gilirannya mempengaruhi implementasi kebijakan.

Di setiap kasus, faktor-faktor dimaksud mempengaruhi implementasi kebijakan dalam berbagai variasi keadaan. Melalui pendekatan dari Edwards III ini, dapat diperoleh suatu pemahaman lebih dalam tentang keterlibatan hubungan yang kompleks terhadap implementasi kebijakan. Dalam konteks ini tampak ketegasan Edwards III yang menyatakan bahwa masing-masing faktor yang diuraikan di atas tidak hanya secara langsung mempengaruhi implementasi, tetapi juga secara tidak langsung mempengaruhi faktor-faktor lain. Keempat faktor di atas saling mempengaruhi satu dengan lainnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi implementasi kebijakan sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 2 : Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung pada Struktur Implementasi



Sumber : Edwards III, 1980 : 148

Howlett dan Ramesh (1995:154) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan transplantasi (pencangkokan atau penerapan) berbagai program (kebijakan) di lapangan, yang ternyata tidak sederhana ketika diterapkan untuk pertama kalinya. Howlett dan Ramesh lebih lanjut menyatakan terdapat 4 hal penting sebagai batasan untuk memahami proses (implementasi) kebijakan publik. *Pertama*, sifat alamiah permasalahan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. *Kedua*, keanekaragaman permasalahan yang teridentifikasi oleh sebuah program pemerintah bisa menyulitkan implementasinya. *Ketiga*, semakin besar dan berbeda ukuran target kelompok, maka akan semakin sulit untuk mempengaruhi perilaku mereka. *Keempat*, perubahan perilaku kelompok sesuai dengan tingkatan kesukaran dalam implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 1997:79) mengemukakan 6 sub variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu : (1). Ukuran dan tujuan kebijakan; (2). Sumber-sumber kebijakan; (3). Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana; (4). Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana; (5). Sikap para pelaksana; dan (6). Lingkungan. Sementara itu, Hoogerwerf (1983:157-161) menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat tiga unsur penting yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Adanya program atau kebijakan yang akan dilaksanakan.



2. *Target group* atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dan perubahan serta peningkatan.
3. Unsur pelaksana organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengolahan, pelaksanaan, dan pengawasan implementasi.

Jones (1984:166) mengemukakan tiga aktivitas utama yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan, yakni *organization*, *interpretation*, dan *application*. Penjelasan ketiga aktivitas ini adalah:

1. *Organization: the establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting program into effect.*
2. *Interpretation: the translation of program language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.*
3. *Application: the routine provision of services, payment or other agreed upon program objectives or instrument.*

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa organisasi berkaitan dengan pembentukan atau penerapan kembali sumber daya, unit, serta metode yang diperlukan untuk menjalankan program. Interpretasi adalah penafsiran agar program menjadi jelas dan dapat diterima dan dapat dilaksanakan. Sedangkan aplikasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

### Penutup

Dalam memenuhi variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik, dapat dilakukan dengan studi tentang variabel implementasi kebijakan, kemudian ditentukan apakah kajian pemahaman tersebut menempatkan kebijakan publik sebagai variabel bebas atau variabel tergantung. Hal ini terlu ditempuh karena akan sangat berbeda hasil maupun dampaknya yang akan diukur.

Model implementasi kebijakan, baik pendekatan *bottom up* maupun *top down* masing-masing memiliki kelebihan maupun kekurangan yang tatkala digunakan, akan menentukan variabel implementasi yang akan dijadikan kajian dalam analisis variabel keberhasilan. Dengan demikian akan tergambar adanya *grand theory*, *middle theory* maupun optimalisasi variabel yang akan digunakan dalam memahami variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakann.

Teori-teori yang dapat digunakan untuk mengukur variabel keberhasilan implementasi kebijakan atau melakukan studi penelitian maupun praktek implementasi kebijakan antara lain bersumber dari:

1. Sabatier (1986) yang menyatakan bahwa terdapat 3 kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
2. Edwards III (1980) yang menyatakan empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3. Howlett dan Ramesh (1995), menyatakan empat variabel untuk memahami keberhasilan kebijakan, yakni sifat permasalahan, keanekaragaman permasalahan yang teridentifikasi, perbedaan ukuran dan target kelompok, serta perubahan target kelompok.
4. Hoogerwerf (1983) mengemukakan tiga variabel penting yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: program yang akan dilaksanakan, *target group* atau kelompok sasaran, dan unsur pelaksana organisasi maupun perorangan.
5. Van Meter dan Van Horn (1997) mengemukakan enam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni: tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri dan sifat badan/instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, sikap dan pelaksana, serta lingkungan.
6. Jones (1984) menyatakan tiga variabel utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

#### Daftar Pustaka:

- Anderson, Jane E, 1994, *Public Policy*, Maliq an Introduction Genra, Illinois, Houghton Triffin Company.
- Dunn, William N., 1994, *Public Policy Analysis: An Introduction*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prantice Hall Int.
- Dye, Thomas R., 1984, *Understanding Public Policy*, 5<sup>th</sup> Edition, Prentice Hall, New Jersey.
- Easton, David, 1965, *A System Analysis of Political Life*, New York, Wiley.
- Edwards III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.
- Hoogerwerf, A., 1983, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Erlangga.
- Howlett and Ramesh, 1985, *Studying Public Policy*, Toronto, Oxford University Press.
- Van Meter, D.S., and Van Horn, C.E., 1978, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, Administration and Society.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005, *Kybernologi: Beberapa Konstruksi Utama*, Tangerang, Sirno Credetion Center.
- Udoji, Chif, J.O., *The African Public Servant as a Public Policy in Africa*, Addis Abeba, Africa Association for Public Administration and Management.
- Wahab, Solihin Abdul, *Analisis Kebijakan Dwi Formulasi dan Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.